

MITIGASI SOSIAL DI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) LABANGKA SUMBAWA BESAR NTB

**Oleh:
Sudaru Murti
STISIP Kartika Bangsa**

Abstract

Every development program, physical or non physical, aims to increase the welfare of society. The transmigration program's goals also includes the increase of income and improving the quality of life of its participants. Nevertheless, several problems can be found within the execution of the transmigration program, such as the location of transmigration or with the participants themselves. While the environment and society undergoes change, a review of the environmental mitigation must be done in order to achieve maximum results. The synergy of change brings a variety of effects such as the segregation of culture, environmental order and a new rule of order. Therefore, a social mitigation review in the location of transmigration using qualitative – participative method using field observation and in-depth interview, hopes to contribute to the execution of the transmigration program. Findings from the field must be equipped with a variety of infrastructure, especially social technology in order to quickly achieve an increasing speed of social capital. By strengthening institutions and increasing participation, it is hoped that the execution of development in the transmigration sector will quickly achieve maximum results.

Keywords: Social Mitigation, transmigration program

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas lingkungan sosial akan mengarah pada *the highest and best use* yaitu nilai manfaat, konotasi ekonomi, dan vitalitas dari suatu bagian wilayah. Ketidakpadanan antara pendekatan dan situasi dapat memperburuk persoalan penerapan yang dilakukan pada suatu wilayah untuk dicoba yang

diselesaikan (Bruce Mitchell, 2000) demi terciptanya keseimbangan dalam pengembangan suatu wilayah, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat selaku pelaku utama. Kondisi seperti tersebut di atas, perlu dilakukan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan sumberdaya alam tanpa merusak lingkungan. Untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang berkualitas khususnya untuk warga miskin dan Menakertrans (2008) mengungkapkan perlu pertimbangan yang serius, dengan alasan, yaitu:

1. Kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan transmigrasi sehingga seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap kualitas lingkungan.
2. Upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas lingkungan terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.

Beberapa faktor ketidakberhasilan penanganan konflik dan kesenjangan yang timbul di lingkungan sosial transmigran karena perencanaan yang tidak matang, sehingga terjadi banyak kesenjangan. Adapun penyebab lain kurangnya implementasi kaidah-kaidah sosial budaya masyarakat dalam jejaring sosial dan kurangnya pemahaman terhadap perilaku tatanan sosial. Dampak penerapan pengusahaan perbaikan lingkungan sosial yang kurang tepat. Terkait pemberian dukungan, mekanisme utama yang seyogianya diterapkan adalah mekanisme integritas yang dipadukan dengan tergalinya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam menjaga dan mempertahankan proses alami lingkungan di sekitarnya. Dalam proses pemenuhan derajat integrasi dan peningkatan kualitas lingkungan sosial, dapat menempatkan mitra lokal sebagai pemain utama dalam menggali dan menjalankan proses tersebut di tengah masyarakat. Proses kegiatan yang akan dijalankan dapat berupa :

1. Konsultasi dan sosialisasi berbagai kegiatan yang digagas untuk dilaksanakan di lokasi kegiatan ;
2. Penguatan institusi kelompok masyarakat;
3. Penguatan kapasitas usaha ekonomi kelompok; dan
4. Pengadaan modal kerja (Sunyoto Usman, 2004).

Pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil, tampak pada pencapaian derajat integritas tinggi. Sedikitnya ada tiga pertimbangan; **Pertama**, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab dan kontribusi masyarakat dunia terhadap pengembangan wilayah transmigrasi. **Kedua**, kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami masyarakat di lahan transmigrasi, seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian terhadap kualitas lingkungan. **Ketiga**, upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan sosial terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.

Kemiskinan (*poverty*) dan ketidakberdayaan (*powerless*) merupakan dua kondisi yang keterkaitannya saling mempengaruhi. Ketidakberdayaan seseorang atau masyarakat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mengelola perasaan, pengetahuan, dan potensi sumberdaya material yang ada karena faktor-faktor dalam diri sendiri atau faktor dari luar (Solomon, 1979, dalam Sunyoto Usman, 2004). Sebenarnya masyarakat memiliki potensi atau sumberdaya, tapi mereka tidak mampu mengelolanya. Faktor internal penyebab masyarakat tidak berdaya, antara lain ketidakmampuan secara ekonomi (kemiskinan), perasaan rendah diri dan tidak berdaya, tidak menyadari bahwa dirinya miskin, kebiasaan bergantung, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedang faktor eksternalnya antara lain terbatasnya informasi, akses terhadap sumberdaya, ketidakadilan, dan adanya kekuasaan yang tidak berpihak pada orang miskin.

Penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dan berhasil mengurangi angka kemiskinan, kualitas hidup orang miskin masih rendah. Mereka masih terbalut berbagai kondisi yang satu sama

lain saling berkaitan, seperti lemahnya hasil tukar produksi, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas SDM, rendahnya akses terhadap hasil-hasil pembangunan, minimnya modal, lemahnya posisi tawar, dan lemahnya organisasi Edi Suharto, 2009).

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasar pengembangan dan pertahanan kehidupan yang bermartabat (Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2004). Hak-hak dasar itu antara lain pekerjaan yang layak, pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, dan partisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Patut dipahami bahwa kemiskinan tidak dapat hanya dipahami dari dimensi ekonomi, kemiskinan juga disebabkan dimensi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan, seperti lemahnya hasil tukar produksi, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas SDM, rendahnya akses terhadap hasil-hasil pembangunan, minimnya modal, lemahnya posisi tawar, dan lemahnya organisasi yang semakin membuat masyarakat tidak berdaya. Secara nyata, antara lain lahan yang tidak subur (marjinal) dan rentan (fragil), keterisolasian, rendahnya modal sosial, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan kerentanan dan disinyalir lingkungan sosial yang penuh konflik.

Di permukiman transmigrasi rentan pencapaian kondisi integrasi warga transmigran, apabila kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan kurang kondusif; seperti munculnya prasangka-prasangka sosial dikarenakan harmonisasi warga transmigran belum tercapai. Upaya yang dapat dilakukan berdasarkan PP, No. 2 Tahun 1999 dengan melakukan Kajian Mitigasi Sosial di kawasan transmigrasi sehingga mendapatkan acuan tindakan optimalisasi melalui kegiatan Bina Mitigasi sosial. Berdasarkan sejumlah isu dan realitas permasalahan pembangunan dan pengembangan permukiman di kawasan lokasi transmigrasi salah

satu solusi atau alternatif untuk pengembangan wilayah permukiman transmigrasi dalam mengentaskan problema permukiman maka dilaksanakan suatu bentuk model pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Determinasi diyakini dari faktor Interaksi antar masyarakat permukiman transmigran dan masyarakat setempat belum dicapai suatu bentuk derajat harmonisasi yang menyebabkan perekatan kehidupan bersama belum tercapai secara harmoni, serasi dan selaras. Latar belakang dari faktor agama, budaya, pendidikan, karakteristik asal daerah dan semangat perjuangan hidup merupakan pendorong yang signifikan terhadap sikap perilaku kecemburuan dan kesenjangan sosial.

Faktor penentu dalam derajat integritas masyarakat adalah terakomodasi berbagai kebersamaan di lingkungan sosial dan yang mempunyai peranan cukup besar adalah budaya. Kondisi budaya masyarakat di lokasi transmigrasi, umumnya masih tergantung budaya asal tanpa memanfaatkan budaya setempat secara optimal. Kualitas lingkungan sosial yang tidak baik akan mengakibatkan masyarakat di permukiman transmigrasi sering terjadi konflik antara lain: terjadinya perkelahian antar warga bahkan mungkin antar lokasi.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan upaya peningkatan peran serta transmigran dalam mewujudkan lingkungan sosial yang sehat. Upaya dilakukan dengan melakukan Kajian Mitigasi Sosial digunakan acuan dalam tindak turun tangan Bina Mitigasi sosial dapat memberi dampak peningkatan pengetahuan dan kepedulian lingkungan yang sehat, yang pada akhirnya akan mendapat integritas transmigran yang tinggi.

Realisasi integrasi kehidupan di kawasan permukiman transmigrasi yang penuh toleransi komprehensif dan inklusif sebagai modal sosial yang perlu terus diupayakan dengan mendorong kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan

tercipta jejaring sosial yang harmonis antara masyarakat pendatang (transmigran) sendiri maupun dengan masyarakat lokal. Salah satu sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan kajian mitigasi sosial ini terumuskannya rencana pemberdayaan masyarakat permukiman transmigrasi yang terintegrasi dengan lingkungan sosial budaya baru (John Field, 2010).

Dalam perspektif sosiologi batasan pemberdayaan (*empowerment*) adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya, termasuk pemerintah. Secara paradoks, memberdayakan secara paternalistik melimpahkan kekuatan (*power*) kepada orang lain bermakna memberdayakan. Memberikan kekuatan akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan oleh Simon (1990) dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment*. Pemberdayaan adalah suatu aktivitas reflektif, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self determination*). Sementara proses memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat procedural yang dilalui masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan bukan merupakan upaya paksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan juga tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harus mencakup harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep social budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Cara Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Ada pun desa yang menjadi objek kajian meliputi: Desa Jaya Makmur, desa sekokat, desa suka Damai, desa Labangka dan desa Suka Mulia.

Pendekatan yang dilakukan (Britha Mitchell, 2009) dengan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* menggunakan kuesioner tak berstruktur dan metode survei dengan kuesioner berstruktur untuk mendapatkan data primer. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan *quick survey* untuk pendataan pendatang, *in-depth interview* dalam mewawancarai informan; tokoh masyarakat, aparat kampung, anggota forum kampung dan petugas UPT. Serta melakukan studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, baik dalam bentuk gambar (Peta), data statistik, maupun dokumen tertulis yang dibutuhkan dalam pembahasan.

Metode analisis data dengan mempergunakan pengolah data numerik, Arc/Info, Arc/View (pengolah peta). Untuk Pengungkapan konflik sosial diidentifikasi dari data wawancara mendalam dilengkapi informasi data sekunder yang ada di instansi terkait dan dimasukkan pada database.

PEMBAHASAN

Profil Lokasi

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kecamatan Labangka selalu mengalami peningkatan. Hingga tahun 2007 berjumlah 9.229 jiwa yang terdiri dari 4.872 penduduk laki-laki dan 4.357 penduduk perempuan. Dari data tersebut diperoleh angka sex ratio sebesar 112, yang berarti dalam 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. Dilihat dari desa-desa yang ada, ternyata di Kecamatan Labangka angka sex rasionya di atas seratus, yaitu berkisar antara 106 hingga 117.

Tabel 1. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Labangka Dirinci per Desa Tahun 2007

Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1. Jaya Makmur	69,23	1.703	25
2. Sekokat	35,04	1.389	40
3. Suka Damai	32,69	2.510	77
4. Labangka	54,50	2.285	42
5. Suka Mulia	51,62	1.342	26
Jumlah	243,08	9.229	38

Sumber: Statistik Kecamatan Labangka

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) selain sebagai objek juga sebagai subjek yang sangat menentukan dalam pembangunan. Peningkatan sumberdaya manusia berarti sumber daya alam yang ada akan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Masalah pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan bangsa kita ini. Sarana prasarana pendidikan sampai tahun 2007, terdapat 7 sekolah Dasar/MI, 4 SLTP Negeri dan Swasta, 1 SLTA serta pendidikan pra sekolah seperti TK sebanyak 2 unit.

Kesehatan untuk mengisi pembangunan, diperlukan generasi muda yang tangguh, dan berintelektual tinggi. Di Kecamatan Labangka terdapat satu buah Puskesmas. Pelayanannya terhadap warga di setiap desa ada Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Dan untuk membantu persalinan biasanya dibantu oleh bidan desa serta dukun bayi yang rata-rata di setiap desa sudah ada dukun bayi terlatih. Segala fasilitas kesehatan yang ada diharapkan warga mendapat pelayanan kesehatan dengan baik.

Pembangunan mental spiritual dilaksanakan dengan membangun sarana-sarana peribadatan. Tahun 2007 terdapat 8 buah Masjid, 6 buah Musholla, dan 3 buah Pura. Penduduk asli

seratus persen beragama Islam, sekitar 8,29% penduduk yang beragama Hindu sebagai transmigrasi program pemerintah maupun yang datang untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha. Sementara banyaknya rumah tangga miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 terdapat 2.302 rumah tangga.

Tabel 2. Banyaknya Rumah Tangga Miskin Dirinci per Desa di Kecamatan Labangka Tahun 2007

Desa	Jumlah Rumah Miskin Awal	Jumlah Rumah Tangga Miskin Susulan	Jumlah Rumah Tangga Miskin
1. Jaya Makmur	315	41	356
2. Sekokat	319	53	372
3. Suka Damai	432	189	621
4. Labangka	565	79	644
5. Suka Mulia	278	31	309
Jumlah	1.909	393	2.302

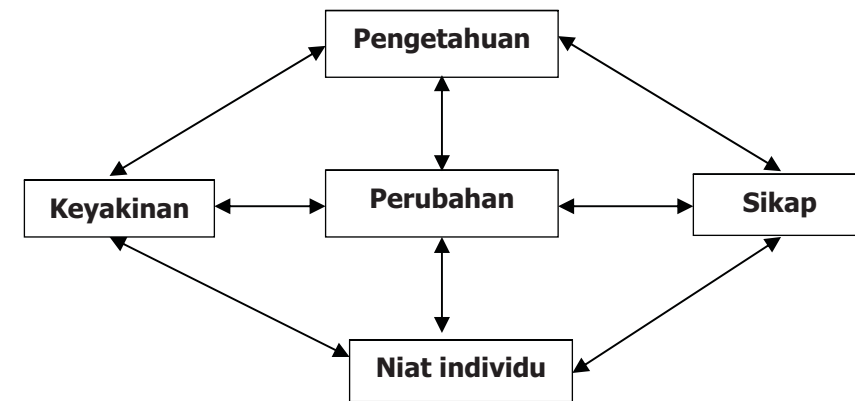
Penanaman pertanian pada lahan kering seperti tegalan, ladang dan lainnya. Dalam prakteknya di lapangan untuk memudahkan komunikasi serta koordinasi antara petugas penyuluhan dengan para petani, dibentuklah kelompok-kelompok tani yang banyak dan tersebar di setiap desa di Kecamatan Labangka. Kelompok tani secara keseluruhan berjumlah 68 kelompok, demikian pula kontak tani ada sebanyak 1 kelompok. Untuk tahun 2007 jumlah ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda masing-masing ada sebanyak 2.342 ekor sapi, 541 ekor kerbau dan 101 ekor kuda. Sedangkan ternak kecil dan unggas yang dipelihara antara lain kambing (1.051 ekor), babi (27 ekor), ayam (4.596 ekor) dan itik (147 ekor), Entok (242 ekor), Angsa (39 ekor), dan Merpati (67 ekor).

Mitigasi Sosial

Pelaksanaan program transmigrasi, mendorong adanya mitigasi yang menuntut adanya perubahan sebagai proses pembangunan. Ada pun bentuk perubahan menurut Isbandi R. Adi (2008:65) diarahkan pada peningkatan kesadaran bagi transmigran yang hendak ditingkatkan kesejahteraannya. Perubahan akan berlangsung secara bertahap, yang dimaksudkan menyangkut:

1. Aspek pengetahuan (*knowledge*). Setiap perubahan dituntut memiliki pengetahuan yang akan mengubah pola perilaku.
2. Aspek keyakinan (*belief*) yang diyakini bahwa perubahan yang berlangsung, bertujuan untuk meningkatkan kehidupan.
3. Aspek sikap (*Attitude*) jika pengetahuan akan perubahan yang diyakini memiliki manfaat, akan disikapi dengan akomodatif.
4. Aspek niat individu (*intention*) bahwa perubahan diawali dari pelaku untuk melakukan perubahan.

Perubahan yang dilakukan, untuk mengubah perubahan perorangan, kelompok dan masyarakat dalam kebersamaan yang terintegrasi. Keberlangsungan perubahan sosial yang berlangsung, tergantung pada beberapa indikator yang dicapai. Penilaian; menyangkut pada berbagai produk sosial sesuai dengan penilaian terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat secara berkesinambungan. Kesenambungan yang dituntut diawali dengan pertanyaan yang menyangkut gagasan apa perubahan itu diharapkan. Kemudian upaya-upaya yang akan dilakukan dalam prakteknya sudah dicapai dalam bentuk nyata.



Gambar 1. Pola Perubahan

Di lokasi Labangka; program transmigrasi berlangsung dimulai sejak tahap pertama tahun 1989/1990 dan tahap keempat pada tahun 1991/1992 dengan sejumlah transmigran yang terkirim ada 1150 KK 5481 jiwa. Memasuki tahun 2007/2008; telah berkembang menjadi 2.857 KK dengan 9.229 jiwa. Artinya secara demografis telah mengalami pertumbuhan 40,61 persen selama 18 tahun.

Pertumbuhan penduduk yang mencapai 40,61 persen, ternyata tidak sepenuhnya dikarenakan para transmigran terkirim. Informasi yang dapat diperoleh dari pengolahan data; asal transmigran dari Lombok ada 74,14 persen, Bali dan Jawa ada 6,90 persen serta Sumbawa (Transmigran Penduduk Setempat/TPS) ada 18,96 persen sudah memiliki daya tarik bagi migran tenaga kerja dari luar, seperti migran musiman dari Bima sebagai tenaga kerja pada saat panen, dan migran yang mengikuti keluarga transmigran lama untuk kemudian bertempat tinggal dan hidup di lokasi kawasan transmigran. Secara struktur sosial dapat dikemukakan, penduduk di Labangka dari asal daerah yang beragam, agama yang berbeda, mata pencaharian yang bervariasi dan kebudayaan yang beragam; jika tidak ada kesadaran hidup

merantau dan bertenggangrasa, rentan terjadinya konflik sosial. Adat istiadat, kebiasaan, pola pikir dan kepribadian yang berbeda, jika niat masing-masing orang yang melakukan interaksi sosial tidak menyadari keberadaan hidup bersama, hanya akan mendorong munculnya friksi-friksi sosial. Apalagi pengetahuan yang sempit dan keyakinan untuk tidak mau berubah, tanpa menyikapi lingkungan dengan bekerjasama saling melengkapi; hanya akan mendorong munculnya kecemburuan sosial.

Langkah-langkah yang perlu diantisipasi, komponen kesadaran penggalian potensi dan penguasaan diri dalam menentukan masa depan dijadikan sebagai modal sosial dalam pemberdayaan. Ada pun pemberdayaan yang perlu dikembangkan, diawali dari penyadaran proses pendidikan yang dapat menggali potensi pribadi yang dimiliki, untuk kemudian dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan, kendala, hambatan dan ancaman yang terjadi.

Kesempatan dan Kendala dalam Berusaha

Hasil wawancara yang mendalam melalui guiding kuesioner dengan informan 15 orang yang dijadikan responden, rata-rata faktor pendorong untuk ikut transmigrasi ada 87,15 persen menyatakan tidak memiliki lahan dan menginginkan dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai pasangan usia subur, ada cita-cita untuk memperbaiki nasib yang semula bermatapencaharian sebagai buruh tani dan tenaga srabutan, sehingga anak keturunan bisa hidup lebih baik. Sedangkan 12,85 persen menyatakan di usia yang telah pensiun dan masih produktif ingin tetap bekerja tanpa menggantungkan anak-anaknya yang sudah bekerja dan menikah.

Lebih lanjut dapat terungkap, usaha yang dilakukan terhadap pekarangan dan lahan hampir seluruhnya 93,33 persen menyatakan telah menghasilkan bahkan telah mengembangkan usaha lebih luas. Pernyataan mereka bisa mengembangkan yang

didapat melalui berbagai penyuluhan yang ada serta media informasi saat kumpul bersama, menyimak informasi elektronik maupun cetak. Bahkan informasi yang diperoleh, mereka telah mengembangkan dengan buka usaha dagang dan membeli peralatan yang meningkatkan nilai ekonomi, seperti alat pemipil jagung. Terbukti ada salah satu responden telah berhasil sebagai eksportir ke Malaysia, sehingga secara ekonomi penghidupan telah meningkat.

Informasi lebih lanjut, keluhan hasil jual di lokasi permukiman tidak bisa tinggi, terkendala sarana pengangkutan sarana jalan rusak. Melalui kesepakatan bersama, diadakan iuran bersama untuk memperbaiki jalan yang diprakarsai tokoh-tokoh masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong.

Rata-rata keluhannya masalah air bersih belum terpecahkan, sumur/parigi terasa payau kedalaman rata-rata 11 meter. Penggunaan air masih dilakukan di sungai maupun penampungan air untuk mandi, mencuci bahkan ada beberapa menyatakan untuk memasak. Walaupun menyedihkan saat musim kemarau kering, namun interaksi sosial dirasakan kehidupan bersama saat di sungai dan bak penampungan air, bisa becanda dan bersapa lebih dekat. Prioritas utama pada pertemuan kelompok yang dihadiri 37 orang, bendungan sungai diharapkan dilengkapi pompa air dan tadah hujan dengan penyaringan air, untuk mendapatkan air bersih dan tercukupi irigasi pertanian dengan tidak sekali panen. Akibatnya kesehatan lingkungan yang berkorelasi dengan air bersih, kulit sering gatal-gatal karena tidak mandi. Selain itu nyamuk malaria masih merupakan keprihatinan mereka, dikarenakan warga yang secara ekonomi masih miskin, buang air kecil dan besar masih dilakukan di pekarangan karena jauh dari sungai.

Transaksi perbankan belum masuk, sehingga kebijakan diambil dengan mendatangkan petugas bank dari kecamatan tetangga, padahal dana yang terkumpul bisa mencapai 4 Milyar. Kemiskinan tersamar di lokasi permukiman tampak dengan fasilitas kepemilikan hidup minimal. Keterikatan emosi dan

budaya daerah asal masih kuat dengan nilai kekerabatan untuk berkumpul. Keberhasilan hasil panen diinvestasikan di daerah asal, bertujuan mempersiapkan kelangsungan pendidikan anak. Artinya setiap hasil panen dibawa ke daerah asal, dengan bus besar walau sarana jalan belum memadai.. Akhirnya sejak ada keputusan Camat yang melarang bus besar masuk, walaupun ada 2 bus mini dan transportasi tradisional, tetapi kebijakan itu mempersulit panen dibawa keluar daerah.

Budidaya pertanian, perikanan dan peternakan, ada 13 orang responden atau 86,67 persen menyatakan telah melakukannya, sedangkan 2 orang responden telah alih profesi ke sektor perdagangan dan transportasi. Kendala sarana dan prasarana seperti; penyuluhan ternak masih sangat minim, nelayan masih dengan peralatan sederhana dan tidak memiliki tempat pelelangan ikan. Hasil tangkapan ikan sebatas subsistem yaitu pemenuhan kebutuhan sendiri maupun tetangga yang butuh. Saprotan dan pergudangan belum ada, serta penjualan hasil per-tanian terbatas bahan baku. Komoditas unggulan jagung di lahan sawah 131 ha pada saat panen tiba, rata-rata tenaga kerja tidak memadai maka mendatangkan tenaga kerja dari Bima dengan upah seperempat hasil panen. Panen jagung setahun sekali diharapkan ada penyuluhan tentang pengembangan budidaya dengan optimalisasi limbah pertanian yang bernilai ekonomi; Seperti bonggol yang berlimpah hanya dimanfaatkan makan ternak dan dibakar, belum diusahakan dikirim ke pabrik gula pengganti tebu.

Pemanfaatan Waktu Luang

Menurut 11 orang responden atau 73,33 persen menyatakan pasca panen yang setahun sekali, dirasakan memiliki waktu luang yang cukup panjang. Sedangkan 26,67 persen mengemukakan tidak pernah merasakan punya waktu luang banyak, sebab mereka mengerjakan lahan tegalan seluas 5.042 ha untuk tanaman yang tidak membutuhkan irigasi, dan pekarangan

yang 410 ha ditanami tanaman buah-buahan, sayur-sayuran dan ternak unggas.

Kemajuan dan keberhasilan pembangunan fisik selama 18 tahun ikut program transmigran, terlihat perkembangan pada bangunan tempat tinggal yang diperbaiki sesuai dengan arsitektur nilai budaya asal Lombok, Bali dan Sumbawa. Pengelompokan yang didasarkan latar belakang asal yang sama dan ikatan kedaerahan yang kuat yang menjadi dasar kebersamaan. Dilain pihak interaksi sosial pada dasarnya memudahkan pencapaian untuk membentuk kesepakatan baru sebagai pengembangan nilai-nilai budaya baru yang inklusif, sepanjang tidak menonjolkan ego ke daerah masing-masing. Penonjolan sentimen kedaerahan, tidak menambah pengetahuan hidup yang akomodatif. Permasalahan transmigrasi tidak hanya masalah kepemilikan, tetapi keyakinan hidup bersama dengan latar belakang nasib yang sama, akan memudahkan memperoleh kerjasama yang kuat. Bentuk-bentuk kerjasama seperti; kerja bakti dan pelatihan aktif dalam kelompok, menurut pernyataan respondent sangat dirasakan manfaatnya.

Sebagian besar responden sebenarnya sangat menghendaki memperoleh ketrampilan dan pelatihan di waktu luang mereka, agar dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Seperti hal nya pengetahuan yang mampu memberi bekal dalam mempersiapkan harmonisasi keluarga, mendidik anak, kesehatan, pendidikan, agama, serta wirausaha yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pelatihan pemberdayaan yang berhubungan kegiatan aktivitas, terdapat jawaban 93,33 persen sangat setuju, dengan alasan kesempatan itu dapat lebih memudahkan proses saling belajar dan sarana interaksi mempersatukan mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda.

Selain itu terungkap keinginan orang tua agar ada kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak dan remaja. Sebagai orangtua wajib memberikan pendidikan dan pengetahuan yang terbaik bagi anak keturunan mereka. Hal tersebut dinyatakan oleh 73,33 persen

responden. Melalui interaksi sosial dan pergaulan, berharap anak-anak dapat mandiri dan dewasa dalam menyikapi lingkungannya. Fasilitas lingkungan keluarga hampir semua responden menyatakan cukup. Sebanyak 60 persen responden menyatakan mereka telah dapat melakukan kehidupan bersama tanpa bantuan dan keterlibatan aparat desa dan kecamatan. Adapun kebersamaan yang mereka lakukan berupa saling bertenggangrasi dengan tetangga kiri-kanan baik menyangkut keyakinan, kebiasaan, kegemaran. Selain itu mereka hidup saling menghargai dan tidak saling mengganggu.

Selanjutnya terdapat 80 persen responden menyatakan aktif pada kegiatan kumpulan tingkat rukun tetangga dikarenakan takut dapat sangsi sosial seperti pengucilan. Selain itu mereka aktif dalam pertemuan pertemuan juga didorong oleh keinginan memperoleh informasi dari hasil pertemuan, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Informasi itu biasanya akan dibahas di pertemuan rukun tetangga. Hal ini menunjukkan kesadaran berorganisasi sudah cukup kuat, dan kehidupan bermasyarakat juga disadari sebagai jejaring sosial yang tidak boleh ada yang terlewatkan.

Usaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, sebagian besar (73,33) persen menyatakan lebih aktif menyimak dari media televisi. Dari 279 orang pemilik TV dan radio, menyatakan mereka aktif menggunakannya. Adapun untuk media cetak baik koran maupun buku, belum begitu mengenal. Dalam hal ini mereka mengakui malas dan tidak suka baca.

Adapun bila ada pelatihan yang melibatkan warga transmigran, pengiriman untuk pelatihan dan pembinaan hanya ditunjuk orang yang memiliki kemampuan penggerak dan mudah untuk belajar. Rata-rata hasilnya akan ditularkan pada lingkungannya baik berupa ketrampilan pertanian, peternakan, kesehatan dan sebagainya. Kendala yang ada, diungkapkan tidak ada keberanian untuk inovasi karena takut resiko. Responden sebagai PLKB banyak memberi penjelasan, semangat

kemandirian masih perlu ditingkatkan. Nilai melakukan apa yang telah diberikan, susah untuk diubah. Perjuangan untuk pertahanan hidup lebih kuat dibandingkan perjuangan untuk mengubah diri dari kebiasaan yang sudah ada untuk kemudian upaya meningkatkan hasil kurang diminati dan tergantung dengan lingkungan kuat.

Persepsi perselisihan hampir 100 persen menyatakan tidak pernah terjadi, alasannya memiliki nasib sama untuk peningkatan kehidupan merantau. Secara tidak langsung mendidik lingkungan hidup tenang dan tentram, sehingga mendorong semakin positif untuk bekerjasama. Apalagi media komunikasi seperti wartel dan kantor pos tidak ada, mengurangi ketergantungan dengan pihak luar lemah, dan media telpon seluler sudah ada, namun rata-rata menyatakan lebih suka digunakan membuat janji pertemuan.

Peran lembaga adat cukup kuat, perselisihan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal (93,33 persen responden). Seperti; ada kehilangan ternak yang tidak dikandangkan, pencuri akan datang menyerahkan sisa uang hasil jual ternak yang telah dipergunakan dengan pola ikatan hubungan yang terjadi lebih bersifat paternalistik primordial di mana peran tokoh masyarakat memiliki peran lebih dominan, mengingat *tuanku guru* seperti di Lombok sebagai orang yang memiliki banyak kelebihan serta dipandang arif dan bijaksana dalam setiap keputusan

SIMPULAN

Permasalahan sosial yang teridentifikasi adalah kemampuan berusaha terhadap lahan dan pekarangan yang tidak menimbulkan konflik kepentingan dan konflik nilai-nilai yang diperjuangkan. Pemanfaatan waktu luang yang ditujukan pengurangan terjadinya konflik hubungan antar manusia dan kepentingan pemenuhan kebutuhan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu perlu memperhatikan

kebutuhan yang mendasar bagi pelaku yang hendak ditingkatkan kesejahteraannya, pada kegiatan kajian sosial mitigasi sosial. Antara peningkatan sarana prasarana fisik dengan peningkatan sarana prasarana sosial, ekonomi dan budaya merupakan dasar berlangsungnya suatu perubahan fisik kampung, sehingga dapat tersusun budaya baru tanpa mengalami *shock culture* yang hanya memperlemah pencapaian derajat integrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2004, *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Bappenas-Jakarta
- Bruce Mitchell, 2000, *Development and Empowerment*, McGraw-Hill Book Company, England.
- Britha Mikkelsen, 2009, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Edi Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Isbandi R, Adi, 2008, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Refika Aditamam Bandung
- John Field, 2010, *Modal Sosial*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Mevi Hermawanti, 2002., *Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nusa Tenggara Timur*, Buletin STPMD “APMD”, IRE Yogyakarta,
- Peraturan Pemerintah, 1999, No.2 tentang *Penyelenggaraan Transmigrasi*.
- Raharto, Aswatini (ed). 1999. *Migrasi dan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia: Isu Ketenagakerjaan*. Jakarta: PPT-LIPI.

Simon (1990), *Rethinking Empowerment*, M.E. Sharpe, Inc., New York.

Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta